



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Februari 2020/Periodik - 2019)

**BIDANG** : YUDIKATIF  
**LEMBAGA** : MAHKAMAH AGUNG  
**UNIT KERJA** : PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG  
**SUB UNIT KERJA** : PENGADILAN AGAMA WONOSOBO

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **IRAWAN HARI WALUYO**
2. Jabatan : **PANITERA**
3. NHK : **520827**

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 621.520.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 354 m2/250 m2 di WONOSOBO, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah Seluas 2.140 m2 di WONOSOBO, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
3. Tanah Seluas 3.000 m2 di WONOSOBO, HIBAH TANPA AKTA Rp. 61.520.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 313.500.000**

1. MOTOR, HONDA SUPRA FIT SEPEDA MOTOR Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 8.500.000
4. MOTOR, VARIO 100 SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
5. MOBIL, HONDA HRV-E Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 285.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** **Rp. 26.450.000****D. SURAT BERHARGA** **Rp. ---****E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp. 12.500.000****F. HARTA LAINNYA** **Rp. ---**



Sub Total	Rp.	973.970.000
III. HUTANG	Rp.	145.845.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	828.125.000

---

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **13 Maret 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.